

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Gambaran Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP Pratama Bandung Karees adalah suatu lembaga yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Pajak yang didirikan dengan tujuan menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan warga Negara Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees berubah nama menjadi KPP Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 dengan menerapkan Sistem Administrasi Modern. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 yang diterbitkan dalam Sebagai upaya pelaksanaan *good governance* dan untuk meningkatkan penerimaan pajak. KPP Pratama Bandung Karees adalah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. KPP dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees meliputi 5 kecamatan dan 32 kelurahan.

3.1.1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”

3.1.2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Berdasarkan visi yang telah disebutkan diatas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung memiliki misi sebagai berikut :

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

Untuk memahami visi dan misi yang telah dikemukakan, maka terdapat nilai-nilai luhur kementerian keuangan yang mendasari visi dan misi tersebut, antara lain:

1. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Berfikir, Berperilaku, dan Bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

3. Pelayanan

Memberi pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

4. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

5. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3.1.3. Moto

S = Senyum

I = Ikhlas

A = Amanah

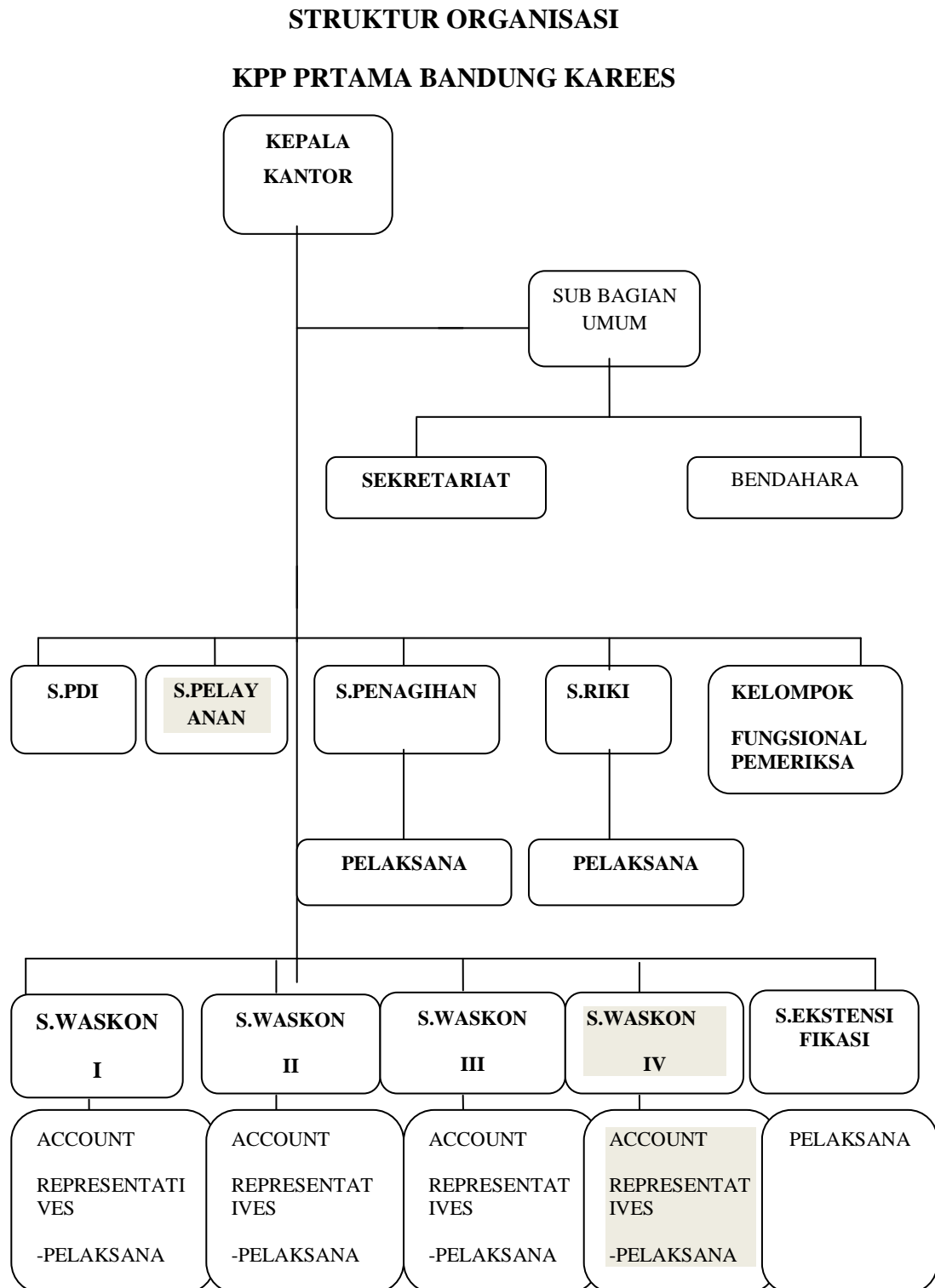
P = Puas

3.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung dikepalai oleh seorang kepala kantor. Dimana kepala kantor bertanggung jawab terhadap semua pihak seksi dan pegawai yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 535/KMK/01/2001. Tentang Susunan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Untuk lebih jelasnya berikut ini struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan data dan Informasi
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

3.2.1. Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Tahun 2012

3.2.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian atau seksi seperti tercantum dalam Surat Keputusan dan Menteri Keuangan No. 442/KMK/01/2001. Keputusan tersebut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Pada bagan yang diarsir diatas merupakan bagian-bagian dari Kantor Pelayanan Pajak yang terlibat dalam proses penerbitan surat tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
3. *Account Representative*
4. Pelaksana Seksi Pelayanan

Tugas pokok dari masing-masing bagian atau seksi yang terkait di dalam proses penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan

Di dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Kepala Seksi Pelayanan bertugas meneliti dan menandatangani Surat Tagihan Pajak yang telah dibuat dan member tugas kepada pelaksana seksi pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Di dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas meneliti dan menandatangani Lembar

Perhitungan dan Nota Perhitungan, lalu melakukan persetujuan penerbitan Surat Tagihan Pajak.

3. Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelayanan Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak dan Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak. Adapun Tugas Pelaksana Seksi Pelayanan yang lain adalah sebagai berikut:

- a) Memproses dan menata usahakan dokumen masuk
- b) Melayani pendaftaran NPWP dan penghapusan NPWP
- c) Penyelesaian permohonan pengukuhan PKP dan permohonan pencabutan PKP
- d) Penyelesaian perubahan identitas wajib pajak
- e) Penyelesaian pemindah wajib pajak atau pengusaha kena pajak
- f) Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPH,dan SPT Masa
- g) Penyelesaian permohonan pembetulan SPPT PBB
- h) Penyelesaian permohonan validasi SSB BPHTB

4. *Account Representative (AR)*

Account Representative berperan penting dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak karena tugasnya adalah memulai mendata sanksi-sanksi yang akan di terbitkan Surat Tagihan Pajak, memilih kasus, membuat Lembar Perhitungan, dan menginput data dan mengirimkan ke *Case Management*. Adapun tugas *Account Representative* yang lain sebagai berikut:

- a) Menyusun estimasi penerimaan pajak
- b) Membuat surat teguran untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SP)
- c) Melakukan analisa dan penelitian atas kepatuhan material wajib pajak
- d) Menginventarisasi SPPT yang tidak/belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan STP PBB
- e) Meneliti data pembayaran BPHTB dan membuat nota Perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan BPHTB
- f) Meneliti dan membuat konsep uraian penelitian pembetulan ketetapan pajak
- g) Meneliti hasil keluaran berupa DHR,SPPT,DHKP dan STTS
- h) Melakukan penelitian Wajib Pajak / PKP yang beralamat fiktif atau menerbitkan Faktur Pajak fiktif dan membuat laporan atas kebenaran informasi tersebut
- i) Melakukan penelitian kepatuhan dan membuat usulan Wajib Pajak patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan di bidang perpajakan dan memberikan bimbingan kepada wajib pajak
- k) Mencari,menerima atau mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan pembuatan/pemutakhiran profil Wajib Pajak
- l) Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak

- m) Secara periodic membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh KPP dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT WP serta membandingkan kecocokan data antar SPT serta membuat konsep surat permintaan penjelasan/himbauan pembedulan SPT/pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum di laporkan dan di bayar
- n) Menginvestasi Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

3.2.3. Kode Etik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

A. Kewajiban

1. Menghormati agama,kepercayaan,budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bekerja keras profesional,transparan dan akuntabel.
3. Mengamankan data atau informasi yang dimiliki DJP.
4. Memberikan Pelayanan kepada WP, sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik baiknya.
5. Menaati perintah kedinasan.
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP.
7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.
- 8.Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
9. Bersikap berpenampilan dan bertutur kata secara sopan.

B. Larangan

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif para politik.

3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.

4. Menyalahgunakan fasilitas Kantor.

5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari WP, sesama pegawai atau pihak lain yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

3.2.4. Strategi kinerja

Strategi kinerja secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah terlaksananya nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan untuk pencapaian visi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees memiliki strategi kinerja khusus, yaitu penerimaan pajak negara yang optimal, tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, pengemasan dokumen SPT, peningkatan efektivitas sosialisasi dan penghumasan, peningkatan penggalian potensi perpajakan, optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi, optimalisasi pelaksanaan penagihan, pembentukan SDM yang berkompentensi tinggi, penataan organisasi yang adaptif dan pelaksanaan anggaran yang optimal.

3.2.5. Aspek Praktik Manajemen

1. Aspek Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan instansi pemerintah yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 58

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa tugas utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Keuangan

Sumber pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai beban instansi beban instansi seperti gaji karyawan dan administrasi. Pada akhir tahun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran atau LRA sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Kantor Wilayah dan dilanjutkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam waktu satu tahun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghasilkan sejumlah tertentu pendapatan Negara, berupa pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat.

3. Aspek Pemasaran

Dalam mempublikasikan layanan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees melakukan beberapa publikasi seperti sosialisasi pajak, seminar pajak, dan pemasangan spanduk-spanduk pajak di lokasi yang strategis.

Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menggunakan berbagai media cetak dan elektronik seperti Radio Pajak, iklan di televisi dan surat kabar, serta situs pajak (www.pajak.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees melakukan publikasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berjumlah 79 pegawai yang terbagi atas sub bagian umum, seksi-seksi, dan fungsional. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh satu kepala kantor yang membawahi 7 pegawai sub bagian umum, 12 pegawai fungsional, 60 pegawai seksi.

Seluruh pegawai merupakan lulusan S1 dan D3 Program Studi Perpajakan, Akuntansi, dan Manajemen. Perekrutan pegawai dilakukan melalui rekrutmen pegawai yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).